



## **Inovasi Bantul Seroja (Sehat Ekonomi Meningkatkan Karo Jamu): Analisis *New Public Governance* dalam Program Layanan Kesehatan Tradisional**

Nabila Septia Rosa <sup>1</sup>, Bintoro Wardiyanto <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Magister Kebijakan Publik, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v3i2.149>

### **CORRESPONDENCE**

E-mail: [nabila.septia.rosa-2022@fisip.unair.ac.id](mailto:nabila.septia.rosa-2022@fisip.unair.ac.id)

### **KEYWORDS**

Bantul Seroja, NPG, Public Service Innovation, Traditional Health

### **ABSTRACT**

*Bantul Seroja Program is a breakthrough innovation launched by the Bantul Regency Government to integrate traditional and conventional health services amid the disruption of the COVID-19 pandemic. This program succeeded in placing Bantul Regency in the top 45 public service innovations of Kemenpan-RB in 2022. By carrying out the New Public Governance paradigm, this program involves collaboration between the government, MSMEs, and the community in making and marketing traditional herbal medicine. This research uses a qualitative method of literature study, using secondary data sources obtained from books, supporting articles, scientific papers, previous studies and other literature. Despite facing challenges in resource availability and the need for product diversification, Bantul Seroja has shown significant improvements in the quality of health services and local economic welfare. Recommendations to strengthen the program include improved coordination across sectors, development of a wider network, and more optimal utilization of resources. With these measures, Bantul Seroja is not only able to respond to the challenges of the pandemic but also encourage sustainability and inclusiveness in local governance. This program is a model for implementing New Public Governance that is effective in overcoming crises and improving the quality of life of the community.*

## **PENDAHULUAN**

Kabupaten Bantul telah menunjukkan produktivitas yang luar biasa dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan gangguan di berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan. Meski begitu, Kabupaten Bantul dengan cepat menyesuaikan diri dengan memanfaatkan teknologi seperti *Internet of Things*, *cloud computing*, dan kecerdasan buatan untuk memperbaiki alur birokrasi. Permintaan masyarakat akan pelayanan publik yang mudah diakses dan merata selama pandemi menjadi dorongan utama untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Untuk menjawab harapan masyarakat akan perubahan pelayanan yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Bantul terus melakukan inovasi. Inovasi-inovasi ini adalah hasil dari evaluasi atas pengaduan dan masukan masyarakat. Salah satu inovasi tersebut adalah program Bantul Sehat Ekonomi Meningkatkan

karo Jamu (Seroja), yang diakui sebagai layanan yang tangguh selama pandemi dan pasca pandemi Covid-19 (Ari, 2022). Inisiatif ini mencerminkan pendekatan *New Public Governance* yang menekankan partisipasi masyarakat dalam perbaikan layanan.

Keberhasilan inovasi Bantul Seroja juga didukung oleh tingginya Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK) di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mencapai angka 7,09 pada tahun 2020 (BPS, 2021). Pada awalnya pengembangan inovasi program ini dimulai dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi di lima Puskesmas yang selanjutnya dilanjutkan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan dusun asuhan mandiri kesehatan tradisional (Sidik, 2022). Melalui integrasi antara pelayanan kesehatan konvensional dan tradisional, program ini telah dijalankan di 12 Puskesmas dan akan diperluas ke seluruh 27 Puskesmas di Kabupaten Bantul. Melalui terobosan baru dalam inovasi pelayanan publik Bantul Seroja, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, berharap bahwa program ini tidak hanya meningkatkan kesehatan tetapi juga perekonomian masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip *New Public Governance* yang menekankan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Namun perlu disadari bahwa peran pemerintah daerah dalam hal menjadi pemangku kepentingan sudah seharusnya mampu memenuhi hak-hak dasar dari masyarakatnya. Paradigma ini yang kemudian menimbulkan pernyataan bahwa konsep ini dapat memberikan solusi inovatif dan menggali potensi dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Selama pandemi Covid-19 hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Bantul terus meningkatkan infrastruktur pelayanan publik. Kepatuhan terhadap standar pelayanan publik menjadi sangat penting untuk mencegah maladministrasi di tengah pembangunan infrastruktur yang semakin merata dan menyeluruh (Anggreati, 2022). Pemerintah harus memastikan bahwa layanan publik memenuhi standar minimal yang ditetapkan, termasuk dasar hukum, persyaratan, mekanisme prosedur, biaya, jangka waktu penyelesaian, dan produk layanan. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal, birokrasi harus agil dan responsif, menghindari prosedur hierarkis yang kaku. Menurut (Amrynudin & Katharina, 2020) birokrasi di masa pandemi Covid-19 masih terjebak kepada prosedur hierarki dan regulasi yang ada. Sehingga hasilnya birokrasi yang semestinya menjadi unsur pelaksana bagi pelayanan yang prima bagi masyarakat menjadi tidak cekatan dan terkesan lamban. Keadaan seperti ini tercermin dari budaya orde baru yang lebih mengedepankan pelayanan secara vertikal (*top-down*) dari pada horizontal (*bottom-up*).

Selama pandemi Covid-19, beberapa layanan publik masih belum optimal dalam memenuhi hak dan kewajiban masyarakat. Bantuan keuangan dan sosial sering kali tidak merata dan prosedurnya tidak jelas (Tan, 2021). Oleh karena itu, model pelayanan publik pada masa transisi pasca-pandemi perlu diperbarui untuk lebih optimal, didorong oleh tata kelola pemerintahan yang lebih cergas dan responsif. Reformasi birokrasi dan pembaruan sistem kinerja pemerintahan sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam menghadapi tantangan disrupsi. Paradigma *New Public Governance* menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan pelayanan publik.

Kontribusi warga negara ke dalam pemerintahan demokratis tergantung pada bagaimana lembaga-lembaga demokratis dan administratif membentuk peluang untuk berpartisipasi (Ansell & Torfing, 2021). Ide Bantul Seroja memberikan peluang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam pengembangannya karena dari awal inovasi ini dibentuk untuk memberikan pelayanan publik yang partisipatif, kolaboratif, dan kerjasama antar pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, mudah untuk melihat perbedaan antara produksi bersama individu dan produksi bersama kolektif. Produksi bersama individu menggambarkan situasi-situasi di mana pelanggan, secara individu atau dalam kelompok, berpartisipasi dalam produksi atau sebagian produksi dari layanan yang mereka gunakan, menerima manfaat yang sebagian besar bersifat pribadi (Brudney & England, 1983, hlm. 63).

Namun, pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini juga menghadapi tantangan dan kendala. Diantaranya adalah kurang kuatnya regulasi dan kebijakan yang mendukung, belum terbentuknya tim khusus melainkan hanya pelimpahan tugas terhadap lembaga yang berkaitan, serta peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam program ini. Oleh karena itu, analisis inovasi Bantul Seroja dalam perspektif *New Public Governance* menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana konsep ini dapat memberikan solusi inovatif, serta menggali potensi dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Perspektif NPG ini juga dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan, mengurangi beban anggaran pemerintah dalam pembiayaan program serta meningkatkan keberlanjutan program melalui pendekatan berbasis ekonomi. Dengan mengkaji inovasi Bantul Seroja dalam perspektif pelayanan publik dalam konteks NPG, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pendekatan tersebut dapat mempengaruhi implementasi dan hasil dari inovasi Bantul Seroja serta implikasinya terhadap pelayanan publik yang lebih baik.

## METODE

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan artikel ini ialah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*literature review*). Literature review merupakan metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini (Adlini et al., 2022). Sumber yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder. Data-data yang diperoleh melalui pendekatan studi kepustakaan, sehingga data-data tersebut dihimpun dari berbagai informasi yang relevan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini. Data-data tersebut diperoleh melalui buku-buku literature, karya tulis ilmiah, tugas akhir, penelitian-penelitian terdahulu, dan sumber-sumber kepustakaan yang lainnya. Teknik analisis data dengan cara menggambarkan dan menganalisis keadaan, situasi sosial berdasarkan teori yang ada dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan yakni pelaksanaan inovasi Bantul Seroja (Kabupaten Bantul Sehat Ekonomi Meningkatkan Karo Jamu) dalam upayanya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik pasca pandemi Covid-19 yang mencerminkan cara pandang administrasi pemerintahan menggunakan *New Public Governance*.

Penelitian yang dilakukan yaitu bersifat deksriptif, dengan memberikan deskripsi serta analisis mengenai pelaksanaan inovasi Bantul Seroja (Kabupaten Bantul Sehat Ekonomi

Meningkat Karo Jamu). Pendataan dalam penelitian kali ini menggunakan data sekunder, yaitu merupakan data yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder. Data sekunder ini didapatkan setelah dilakukannya penelusuran serta dokumentasi terhadap sumber bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan inovasi Bantul Seroja (Kabupaten Bantul Sehat Ekonomi Meningkatkan Karo Jamu) serta komponen pelengkap lainnya. Sumber data yang diambil dalam penyusunan artikel ini adalah sumber data sekunder, yaitu sumber data yang bersifat pribadi dan publik (Fadli, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 telah mengganggu kondisi pelayanan publik, menjadikannya salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius. Tantangan disrupsi ini menyebabkan peningkatan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, menurut kajian dari Tan (2021), pelayanan publik harus mampu menerapkan prinsip-prinsip seperti koordinasi, ekonomis, keterpaduan, akuntabilitas, pendelegasian, dan akuntabilitas. Salah satu inovasi program pelayanan publik yang harus mampu menjawab tantangan disrupsi ini adalah Bantul Sehat Ekonomi Meningkatkan Karo Jamu (Bantul Seroja). Program ini telah berhasil masuk dalam top 45 ajang kompetisi inovasi pelayanan publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tahun 2022 (Ari, 2022).

Program Bantul Seroja mengintegrasikan pelayanan kesehatan konvensional dan tradisional di sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Bantul untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Literatur selama pandemi Covid-19 juga menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas pelayanan publik selalu berkaitan dengan pembangunan kualitas, kapasitas, dan kapabilitas birokrasi pemerintahan. Kajian oleh Alam & Prawitno (2015) menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pelayanan publik sangat bergantung pada implementasi reformasi administrasi dan birokrasi yang menyeluruh melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Tanpa reformasi yang konsisten, pelayanan publik yang optimal dan prima tidak akan tercapai. Penelitian Pratama (2021) menjelaskan bahwa keterbatasan kapasitas birokrasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat menyebabkan belum terpenuhinya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Program Bantul Seroja lahir dari budaya turun-temurun masyarakat Bantul yang meminum ramuan tradisional seperti jamu. Tujuan program ini adalah mengembangkan integrasi layanan kesehatan tradisional empiris dengan pelayanan kesehatan konvensional. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul berupaya meningkatkan diversifikasi produk jamu beserta khasiatnya. Dari sisi governance, program ini berawal dari inisiatif layanan kesehatan tradisional untuk memanfaatkan potensi lokal dan mengintegrasikannya dengan layanan kesehatan konvensional. Pemerintah Kabupaten Bantul perlu memastikan struktur pengelolaan yang baik dalam koordinasi dan pelaksanaan program, serta melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang memainkan peran strategis. Program Bantul Seroja dijalankan oleh Bagian Layanan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, tanpa membentuk tim

husus, tetapi dengan pendelegasian tugas dan wewenang kepada bidang tersebut untuk berkoordinasi dengan Puskesmas di Kabupaten Bantul. Kesembilan Puskesmas yang terlibat antara lain Puskesmas Jetis II, Kasihan II, Banguntapan II, Imogiri I, Sedayu I, Piyungan, Srandakan, Dlingo II, dan Bantul II (Bantul, 2022). Lebih lanjut lagi merujuk kepada data dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul 2024 beberapa Puskesmas sejak tahun 2019 telah memberikan pelayanan kesehatan tradisional berupa akupresur, akupuntur, ramuan tradisional serta meditasi. Adapun secara lebih lengkap data Puskesmas tradisional dapat dilihat melalui gambar yang memberikan pelayanan kesehatan berikut :

**Tabel 1. Puskemas Pemberi Layanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi**

Tahun	Jumlah Puskesmas Pemberi Layanan	Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional
2019	5	Akupuntur, akupresur, ramuan tradisional dan meditasi, asuhan mandiri ramuan dan pijat
2020	7	
2021	9	
2022	9	

Sumber : RKPD Kabupaten Bantul, 2023

Gambar tersebut menunjukka bahwa setiap tahun jumlah Puskesmas yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi mengalami peningkatan berjumlah 9 puskesmas hingga tahun 2022. Implementasi kelembagaan dan tata kelola dalam program ini terlihat strategis dan rapi, meskipun tantangan dalam sumber daya produksi pengobatan tradisional masih ada. Program ini harus memenuhi kebutuhan dengan membeli sumber produksi dari Kabupaten Kulon Progo dan mendatangkan hasil produksi ramuan herbal dari Tawangmangu. Upaya pengembangan program Bantul Seroja untuk tahun 2023-2024 termasuk menambah jumlah Puskesmas dan memberdayakan pos-pos produksi jamu di setiap dusun.

Kabupaten Bantul, dengan kondisi agrokultural dan sumber daya kelautan yang melimpah, memiliki potensi besar untuk mendukung produksi jamu. Upaya inovasi yang perlu ditingkatkan oleh setiap Puskesmas meliputi pengembangan pengobatan ramuan atau jamu, pelayanan pijat atau akupresur, pelayanan akupuntur, dan meditasi atau mindfulness. Diversifikasi produk juga penting, dengan mengembangkan produk yang lebih variatif, higienis dalam pengemasan, dan mudah diterima masyarakat, seperti sirup, selai, bubuk, pasta, minyak, kapsul, dan simplisia.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menyediakan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait proses produksi jamu, namun pemasaran diserahkan kepada masing-masing rumah produksi (UMKM) penghasil ramuan/jamu. Selain itu, berdasarkan dokumen dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, upaya pendampingan terintegrasi yang dilakukan antar Organisasi Perangkat Daerah mencakup perizinan, pemasaran, dan penanaman toga. Implementasi program Bantul Seroja yang berupa Layanan Kesehatan Tradisional ramuan/jamu di lapangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: 1) pembuatan ramuan jamu di Padukuhan, 2) pelatihan terintegrasi antar OPD, 3) pelatihan keamanan pangan (PKP), dan 4) pelatihan pemasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan melalui survei yang diadakan setiap semester dengan bantuan Diskominfo Kabupaten Bantul. Namun, dari survei yang dilakukan, hanya setengah dari 100 responden pengguna program Bantul Seroja yang memberikan tanggapan. Pada tingkat masyarakat yang lebih kecil, pembinaan juga dilakukan melalui pertemuan berkala setiap tiga bulan sekali. Kepala Puskesmas Kasihan II menjelaskan bahwa program Bantul Seroja mendapatkan pendanaan dari bantuan operasional kesehatan pusat dan daerah dari Dana Keistimewaan (Danais).

Sumber dana pada inovasi ini dari APBD DIY melalui DP3AP2 DIY, CSR Pertamina, dan BKK Dana Keistimewaan melalui Dinkes. Lokasi s.d tahun 2022 terdapat di 9 Kapanewon, 17 kalurahan, 21 Padukuhan, dan akan di replikasikan ke seluruh kapanewon pada tahun 2025. Program ini menjadi salah satu komponen dalam pembentukan Desa Mandiri Budaya di Kabupaten Bantul. Konsep kebaruan dari inovasi Bantul Seroja adalah sebagai berikut: a) Pemberdayaan kelompok wanita tani, b) Meningkatnya produsen ramuan jamu dan memiliki ijin Produk Industri Rumah Tangga (PRIT), c) Keamanan konsumsi ramuan jamu, d) Peningkatan nilai ekonomi produk ramuan jamu, e) Pendampingan Desa Wisata Jamu, f) Pengakuan terhadap budaya lokal, g) Peningkatan produksi oertanian tanaman obat sebagai bahan baku jamu, h) Pembinaan dan pemantauan terhadap Bantul Seroja dilaksanakan secara terintegrasi (RKPD Bantul, 2024).

Integrasi pelayanan kesehatan tradisional dengan pelayanan kesehatan konvensional di Puskesmas membuktikan bahwa program Bantul Seroja berorientasi pada masyarakat. Selain itu, program ini memberikan tambahan penghasilan bagi ibu rumah tangga. Namun, beberapa rumah produksi ramuan/jamu masih kesulitan memenuhi kebutuhan bahan baku sendiri. Kepala Puskesmas Banguntapan II menjelaskan bahwa produksi ekstrak jamu masih harus membeli bahan dari luar karena baru satu kelompok yang mampu membuat ekstrak. Maka dari itu pengembangan program Bantul Seroja masih perlu untuk ditingkatkan lagi dengan proses keberlanjutan inovasi yang tersusun secara sistematis. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul terkait laporan Program Bantul Seroja kepada Kementerian PANRB terdapat road map pengembangan program ini dari tahun 2019-2025 yang dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar 1. Keberlanjutan Inovasi Program Bantul Seroja

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan (Bantul, 2023)

Program Bantul Seroja dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan melalui Bagian Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan bantuan dari bagian program dan seksi promosi kesehatan serta berbagai lembaga pemerintah daerah yang lain. Kegiatan inovasi adalah pelatihan pembuatan jamu, dan pemasarannya. Kegiatan ini didukung oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk pemasok emponempon bahan jamu, Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mendampingi kelompok perempuan melalui Desa Prima, Dinas Pariwisata mendukung Desa Wisata Jamu, TP PKK mewadahi ibuibu pembuat jamu, Dinas Kebudayaan mengusulkan WBTB ramuan "Wedang Uwuh" dan Dinas Kesehatan mendampingi pembuat ramuan jamu hingga memiliki PIRT. Anggota adalah produsen jamu, sedangkan tenaga kerja adalah produsen jamu dan pekerja yang direkrut oleh produsen jamu tersebut. Program ini harus memenuhi dua aspek utama yaitu membantu pelayanan kesehatan dengan ramuan jamu sebagai produk komplementer dan meningkatkan perekonomian. Pelayanan publik yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas proses harus menyeimbangkan kedua aspek tersebut.

Kepala Puskesmas Banguntapan II menyatakan bahwa edukasi harus dilakukan sejak awal untuk menjelaskan bahwa jamu/ramuan dapat menjadi pendamping (komplementer) dan melibatkan pasien dalam proses ini. Pendapatan pengusaha/rumah produksi Bantul Seroja juga meningkat, dengan akumulasi pendapatan dari tahun 2020 sebesar Rp 1,56 M menjadi Rp 3,25 M pada tahun 2021, dan hingga April 2022 sudah mencapai Rp 736 juta.

Berdasarkan pemahaman Runya, et al. (2015) tentang New Public Governance, program Bantul Seroja dapat dianalisis menggunakan 6 generalisasi tata kelola publik baru yang telah dirangkum secara teoretis atau fitur paradigma dari "Pemerintahan Publik Baru" atau NPG sebagai enam aspek berikut ini :

**1. Pertama, *New Public Governance* menekankan pada penyebaran kekuasaan. Menurut "*New Public Governance*", selain pemerintah dan pasar, organisasi lain dalam masyarakat juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam manajemen urusan publik, dan pada saat yang sama memiliki hak keputusan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah publik.**

Program Bantul Seroja melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, UMKM, dan masyarakat setempat dalam manajemen urusan publik. Masing-masing rumah produksi (UMKM) memiliki hak untuk memasarkan produk mereka sendiri dan berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah publik. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul hanya menyediakan SOP produksi, sementara pemasaran diserahkan kepada UMKM penghasil ramuan/jamu. Selain itu, terdapat upaya pendampingan terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mencakup perizinan, pemasaran, dan penanaman toga.

**2. Kedua, *New Public Governance* menekankan koordinasi pemerintah. Sejak lama pemerintah dianggap sebagai pusat administrasi publik, mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi.**

Pemerintah bertindak sebagai koordinator dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan sosial dan sumber daya publik melalui dialog dan koordinasi lintas sektor.

Implementasi program ini melibatkan koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan OPD lainnya dan pemangku kepentingan lintas sektor seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dinas Kesehatan juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

3. **Ketiga, *New Public Governance* membentuk jaringan yang kompleks. *New Public Governance* mengintegrasikan organisasi sosial dan individu untuk membentuk jaringan kompleks yang berisi konsentrasi dan pembatasan kekuasaan dari semua aspek.**

Program ini membentuk jaringan kompleks yang melibatkan pemerintah, masyarakat, UMKM, dan lembaga lainnya dalam pelaksanaannya. Program Bantul Seroja melibatkan Puskesmas, UMKM, dan komunitas setempat dalam proses produksi dan pemasaran jamu. Selain itu, terdapat pelatihan terintegrasi antar OPD dan pelatihan keamanan pangan (PKP).

4. **Keempat, jaringan pemerintah (*governance network*) didasarkan pada pertukaran sumber daya. Menurut *New Public Governance*, bentuk jaringan oleh produk dan layanan publik dapat menyediakan sumber daya sosial yang melimpah bagi anggotanya untuk bertukar, termasuk mata uang, informasi, dan teknologi.**

Program ini memperkenalkan mekanisme berbagi sumber daya antara anggota jaringan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Pertukaran informasi dan teknologi dilakukan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, serta koordinasi dengan OPD lain untuk perizinan dan pemasaran.

5. **Kelima, jaringan tata kelola bergantung pada kepercayaan dan stabilitas kontrak. *New Public Governance* bergantung pada kontrak khusus yang bergantung pada kepercayaan status dan reputasi anggota.**

Pelaksanaan program ini bergantung pada kepercayaan antara berbagai pihak yang terlibat, meskipun stabilitas juga didukung oleh monitoring dan evaluasi. Kepercayaan dibangun melalui pertemuan berkala dan monitoring oleh Dinas Kesehatan. Kepala Puskesmas Banguntapan II menekankan pentingnya edukasi dan keterlibatan pasien dalam menggunakan ramuan jamu sebagai produk komplementer.

6. **Keenam, menghargai peran organisasi sosial publik. Menurut "*The New Public Governance*", esensi pelayanan publik adalah untuk melayani warga negara dan mengejar kepentingan publik.**

Program ini menghargai peran organisasi sosial publik dan bertujuan untuk melayani warga negara serta mengejar kepentingan publik. Program Bantul Seroja tidak hanya berfokus pada penghasilan tambahan bagi ibu rumah tangga, tetapi juga pada pelayanan kesehatan masyarakat melalui integrasi jamu dan pelayanan konvensional. Organisasi publik sosial seperti Puskesmas dan UMKM bekerja sama untuk menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif.

Secara keseluruhan, program Bantul Seroja sudah sesuai dengan enam aspek dari paradigma *New Public Governance* dengan adanya partisipasi berbagai pihak, koordinasi lintas sektor, pembentukan jaringan kompleks, pertukaran sumber daya, kepercayaan dalam pelaksanaan, dan penghargaan terhadap peran organisasi sosial publik.



## KESIMPULAN

Program Bantul Seroja merupakan inisiatif inovatif dari Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk mengintegrasikan layanan kesehatan tradisional dan konvensional dalam rangka menjawab tantangan disrupsi akibat pandemi COVID-19. Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Kesehatan, Puskesmas, UMKM, dan masyarakat setempat, untuk memberikan pelayanan kesehatan melalui ramuan/jamu tradisional. Program ini telah menunjukkan keberhasilan dengan masuk dalam top 45 ajang kompetisi inovasi pelayanan publik Kemenpan-RB tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, Program Bantul Seroja menekankan pada koordinasi lintas sektor, pendampingan terintegrasi, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produksi dan pemasaran jamu. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas program.

Namun, program ini menghadapi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya produksi, kebutuhan akan diversifikasi produk jamu, dan dukungan infrastruktur yang belum memadai. Selain itu, komunikasi dan koordinasi yang efektif antar pihak yang terlibat perlu ditingkatkan. Tentunya diperlukan beberapa rekomendasi yang mampu dipertimbangkan untuk dipilih sebagai bentuk perkembangan terhadap keberlanjutan program Bantul Seroja, sebagai berikut :

1. Lebih memperluas partisipasi organisasi masyarakat dan UMKM dalam proses perencanaan dan implementasi program serta mengadakan forum-forum dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan meningkatkan kolaborasi.
2. Memperkuat peran pemerintah sebagai koordinator dengan membangun platform dialog yang lebih intensif dan integratif
3. Membangun dan memperkuat jaringan antara pemerintah, masyarakat, UMKM, dan organisasi lain salah satunya dengan memfasilitasi pembentukan asosiasi atau kelompok kerja yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan untuk berbagi informasi dan sumber daya.
4. Memperkenalkan mekanisme berbagi sumber daya yang lebih efektif, termasuk teknologi, informasi, dan pendanaan yang difokuskan untuk pengembangan sistem informasi terpadu agar memudahkan akses dan pertukaran sumber daya antar stakeholder.
5. Memastikan adanya kontrak kerja yang jelas dengan UMKM dan pihak terkait, serta melakukan evaluasi berkala untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan.
6. Memastikan bahwa organisasi sosial dan UMKM mendapatkan bantuan yang memadai untuk menjalankan peran mereka dalam program ini serta dukungan lain yang berbentuk pelatihan dan fasilitas.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, Program Bantul Seroja diharapkan dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan kolaboratif sesuai dengan prinsip-prinsip *New Public Governance*.

## REFERENSI

- Alam, S., & Prawitno, A. (2015). Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 93-104.

- Amrynudin, A. D. K., & Katharina, R. (2020). Birokrasi Dan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19. *Pusat Penelitian*, XII(9), 25–30.
- Anggreati, R. (2022). Pandemi, Otda, dan Tantangan Menggenjot Kapasitas Pemda - Medcom.id. Medcom.Id.
- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). Co-creation: the new kid on the block in public governance. *Policy and Politics*, 49(2), 211–230.
- Ari, S. (2022). Inovasi Bantul Seroja Masuk Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. *TribunJogja.Com*.
- Bantul, D. K. K. (2022). Bantul Seroja Sehat Ekonomi Meningkatkan Karo Jamu.
- BPS. (2021). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) 2020. Badan Pusat Statistik, No. 63/08/(63), 1–8.
- Callens, C. (2022). User Involvement as a Catalyst for Collaborative Public Service Innovation. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Creswell, J. W. C. dan J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Kumorotomo, W. (2020). Envisioning Agile Government: Learning from the Japanese Concept of Society 5.0 and the Challenge of Public Administration in Developing Countries. *122(Iapa)*, 144–163. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200301.008>
- Pratama, M. Y. J. (2021). Pembangunan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik. *JUNAIDI (Jurnal Ilmu Administrasi Dan ...)*, 11–26.
- Putri, L. D. M., & Mutiarin, D. (2018). Efektifitas inovasi kebijakan publik; Pengaruhnya pada kualitas pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*.
- Runya, X., Qiqui, S., & Wei, S. (2015). *The Third Wave of Public Administration: The New Public Governance*. Canadian Social Science.
- Sidik, H. (2022). Bantul Seroja ditetapkan jadi Top Pelayanan Publik Kemenpan RB. *Antaraneews.Com*.
- Sorrentino, M., Sicilia, M., & Howlett, M. (2018). Understanding co-production as a new public governance tool. *Policy and Society*. <https://doi.org/10.1080/14494035.2018.1521676>
- Soundararajan, V., Sahasranamam, S., Khan, Z., & Jain, T. (2021). Multinational enterprises and the governance of sustainability practices in emerging market supply chains: An agile governance perspective. *Journal of World Business*, 56(2), 101149. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2020.101149>
- Tan, W. (2021). Tantangan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Efektif Pada Pandemi Covid 19. *Veritas et Justitia*, 7(2), 459–480. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4300>
- Taufik, T., & Warsono, H. (2020). Birokrasi baru untuk new normal: tinjauan model perubahan birokrasi dalam pelayanan publik di era Covid-19. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi ...*, 2(1), 1–18.
- Thaiana Lima, Carlos Eduardo Barbosa, J. M. D. S. (2017). Analysing Agile Governance Processes in The Brazilian Government Scenario. *International Journal of Management and Decision Making*, Vol. 16(1). <https://doi.org/10.1504/IJMDM.2017.10004134>
- Vernanda, R. (2020). Kesiapan Indonesia Menuju Agile Governance. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 4.0 (KNIA 4.0)*, 1–6.